

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERUBAHAN

PERDAPROV. NTT NO. 6, LD 2021/NO.006 TLD NO.

2021

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati antara Pemerintah Daerah DPRD, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 23 Tahun 2020, PERPRES No. 33 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007, PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012, PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERMENKEU No. 17/Pmk.07/2021, PERMENKEU No. 94/Pmk.07/2021, PERMENKEU No. 125/KMK.07/2021, PERDAPROV. No. 9 Tahun 2014 dan PERDAPROV. No. 8 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi bertambah/berkurang terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dari anggaran yang semula direncanakan. Uraian lebih lanjut APBD, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2021
- Penjelasan : 4 Hlm